

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Pengertian ini terdapat tiga aspek yang ditekankan yaitu pertama, Pertumbuhan Ekonomi adalah suatu proses dan bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa ada aspek dinamis dari suatu perekonomian, yang artinya yaitu suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Kedua, yaitu Pertumbuhan Ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, di sini jelas ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Aspek ketiga adalah perspektif jangka panjang. Suatu perekonomian tumbuh dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya sepuluh, dua puluh, lima puluh tahun atau bahkan lebih lama lagi. Pertumbuhan Ekonomi akan terjadi apabila ada kecenderungan dari proses internal perekonomian itu atau kekuatan yang berasal dari perekonomian itu sendiri (Boediono, 2012:1).

Pertumbuhan Ekonomi merupakan indikator yang umumnya digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dan kemajuan perekonomian di dalam suatu daerah dengan ditunjukkan oleh perubahan output. Menurut Susanti (2012) Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator yang digunakan untuk mengukur Pertumbuhan Ekonomi di tingkat nasional adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencerminkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi di dalam perekonomian, sedangkan menurut Djoyohadikusumo (2014: 1) meningkatnya produksi barang dan jasa dari suatu daerah, secara makro dapat dilihat dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya dan secara mikro dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto per kapitanya. Indikator lain yang digunakan untuk menghitung Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) adalah perubahan pendapatan riil dalam jangka waktu panjang, nilai kesejahteraan penduduk, tenaga kerja dan pengangguran.

Terkait dengan Pertumbuhan Ekonomi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, hal ini merupakan prinsip dari otonomi daerah. Menurut Bastian (2016: 338) otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Otonomi daerah harus disadari sebagai suatu transformasi paradigma dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah, karena program otonomi daerah adalah mempercepat Pertumbuhan Ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah ini ditempuh melalui peningkatan hak dan tanggung jawab pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri (Bastian, 2016: 354).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014, tujuan otonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu substansi yang termuat di dalam otonomi daerah adalah desentralisasi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. pengertian ini sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan.

Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan

di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah. Sebab, otonomi daerah merupakan kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur, dan mengurus daerahnya sendiri tanpa ada campur tangan serta bantuan dari pemerintah pusat. Adanya desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara hingga daerah otonom tersebut dapat mandiri dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional.

Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah memiliki wewenang untuk menggali hasil pendapatan daerah dan melakukan alokasi mandiri untuk memprioritaskan dalam hal pembangunan, dengan harapan dapat pemeratakan pembangunan di segala wilayah dengan potensi masing-masing sesuai keinginan daerah. Menurut Bastian (2016: 332) di dalam azas desentralisasi, seiring dengan diserahkannya kewenangan ke daerah, pemerintah pusat harus menyerahkan pembiayaan, personalia, dan perlengkapan (3P) sebagai syarat mutlak. Desentralisasi selalu dimaknai sebagai distribusi sumber daya dari pusat ke daerah.

Desentralisasi diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Menurut UU No. 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan hasil penerimaan daerahnya untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, oleh karena itu peningkatan PAD, DAU dan DAK selalu diupayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dan peningkatan PAD, DAU dan DAK tersebut harus berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi daerah, namun daerah tidak akan berhasil, bila daerah tidak mengalami Pertumbuhan Ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD, DAU dan DAK. Keberhasilan peningkatan PAD, DAU dan DAK hendaknya tidak hanya diukur

dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan Ekonomi yang baik dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Menurut E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2004), secara umum sumber-sumber utama bagi Pertumbuhan Ekonomi adalah adanya investasi. Investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atausumber daya manusia dan fisik yang selanjutnya berhasil meningkatkan kuantitas sumber daya produktif dan yang bisa menaikkan produktivitas seluruh sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Investasi memicu Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kenaikan investasi mengindikasikan telah terjadinya kenaikan penanaman modal atau pembentukan modal.

Menurut Ariefiantoro dan Saddewisasi (2011), faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut akan memungkinkan suatu daerah menambah produksi. Faktor lain menurut Supartoyo, Tatum dan Sendouw (2013) antara lain laju pertumbuhan angkatan kerja, karena termasuk faktor produksi yang menggerakkan perekonomian di daerah. Laju pertumbuhan ekspor netto juga berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi walaupun belum besar peranannya, sedangkan faktor lain yaitu pengeluaran pemerintah, terjadinya peningkatan pengeluaran pemerintah misalnya untuk penyediaan atau perbaikan infrastruktur maka proses produksi barang dan jasa akan semakin lancar. Pengeluaran pemerintah akan memicu bertambahnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus karena kenaikan pengeluaran pemerintah mengindikasikan kenaikan jumlah anggaran daerah.

Kota Surakarta juga disebut Solo, adalah wilayah otonom dengan status Kota di bawah Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan penduduk 503.421 jiwa (2010) dan kepadatan 13.636/km<sup>2</sup> dan kota dengan luas 44 km<sup>2</sup>. Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan, jasa wisata (hotel, restoran, budaya dan hiburan) serta jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektoral dari PDRB Kota Surakarta. Sektor

perdagangan, hotel dan restoran merupakan kontributor sektor terbesar dalam struktur PDRB Kota Surakarta. Sub sektor perdagangan, termasuk dalam kategori ini adalah perdagangan besar (grosir) dan eceran (retail), baik di bidang tekstil dan turunannya, termasuk di bidang food and beverage. Pertumbuhan dari sektor ini termasuk tinggi disamping dari sektor jasa keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2004), Ariefiantoro dan Saddewesisasi (2011), dan Supartoyo, Tatu dan Sendow (2013) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengeluaran pemerintah, investasi, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dan ekspor.

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi tersebut, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta”.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta ?
2. Apakah Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta ?
3. Apakah Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak berikut ini :

1. Bagi pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Surakarta.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam menerapkan ilmu yang didapat dari mata kuliah penelitian ini dan untuk memperluas pemahaman tentang Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kota Surakarta.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberi manfaat, memberi pengetahuan dan sebagai referensi bacaan dari informasi ini untuk lebih mengerti tentang Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Kota Surakarta.